

# POLARISASI ALIRAN KEAGAMAAN MENYIMPANG DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LUTFATUL AZIZAH

[lutfatulazizah@uinmataram.ac.id](mailto:lutfatulazizah@uinmataram.ac.id)

AIDUL FITRIAWAN

[aidulfitriawan@uinmataram.ac.id](mailto:aidulfitriawan@uinmataram.ac.id),

WINDI FITRIANI

[210602037.mahasiswa@uinmataram.ac.id](mailto:210602037.mahasiswa@uinmataram.ac.id)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

---

## Abstract

*This study analyzes social polarization toward religious groups considered deviant in Central Lombok, where movements such as Wahdatul Wujud, Islam Sasak, Shamsiyah, and Ahmadiyya have developed distinct religious interpretations. Their presence has raised concerns about doctrinal purity and social stability within the Muslim-majority community. Using Karl R. Popper's theory of social polarization, this research explains the tendency of local society to adopt closed attitudes toward religious interpretive diversity. The study employs a qualitative approach, with data collected through field observations, in-depth interviews, and document analysis, which were analyzed thematically to capture prevailing social dynamics. The findings indicate that the emergence of these groups is driven by several factors, including low levels of religious literacy, the persistence of local cultural traditions, and dissatisfaction with formal da'wah practices. These conditions contribute to social division between groups defending orthodox Islamic teachings and those advocating greater religious freedom. The response of governmental and religious authorities particularly through heresy fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) and intensified surveillance has further strengthened polarization. As a result, affected groups experience stigma, social exclusion, and occasional conflict, with the Ahmadiyya community facing the most severe pressure. The study concludes that strengthening inclusive religious education, promoting intergroup dialogue, and implementing strategies of religious moderation are crucial to reducing polarization and fostering social harmony in Central Lombok.*

**Keywords :** Social Polarization, Religious Sects, Religious Moderation



## A. Pendahuluan

Lombok Tengah lebih dikenal dengan daerah pariwisata yang indah. Selain tempat-tempat wisata yang indah, Lombok Tengah sebagaimana lazimnya wilayah di Indonesia memiliki kekayaan suku, agama dan ras. Kendatipun demikian, dalam konteks pluralitas tersebut, terdapat juga kelompok-kelompok aliran keagamaan yang seringkali dianggap menyimpang oleh masyarakat. Secara historis dan nasional muncul gerakan keagamaan telah lahir pasca runtuhan presiden ke-2 Soherato pada tahun 1998, karena sebelumnya gerakannya sangat dilakukan secara tertutup (Saparudin, 2018). Aliran-aliran keagamaan menyimpang ini bermunculan seiring dengan proses perkembangan masyarakat. Polarisasi dan stigmatisasi terhadap kelompok-kelompok tersebut seringkali menimbulkan konflik sosial dan ketegangan antar masyarakat. Menelisik polarisasi kemunculan kelompok aliran keagamaan menyimpang di Lombok Tengah menjadi penting untuk memahami dinamika sosial dan religiusitas masyarakat setempat. Dinamika sosial yang dimaksudkan adalah bagaimana respon masyarakat terhadap kemunculan kelompok aliran keagamaan tersebut sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa kelompok aliran keagamaan seringkali menimbulkan konflik sosial keagamaan yang dimantik oleh kedirian seseorang-kelompok yang menafsirkan dirinya yang paling benar dan taat (Umam, 2016).

Beberapa kelompok aliran keagamaan yang terindikasi dan menimbulkan konflik diantaranya adalah di Desa Menemeng



Kecamatan Pringgarata. Menurut penuturan Kadis Bakesbangpol bahwa terdapat kelompok yang mengajarkan ajaran yang dianggap sesat. Beliau menceritakan telah melakukan upaya mediasi dengan warga dan melakukan penanganan bersama dengan FKUB (Wawancara, 2024). Selain itu terdapat juga kelompok majelis taklim yang bertempat di Desa Sintung Kecamatan Pringgarata (Suara NTB.com, 2017). Keduanya muncul di satu wilayah administrative yang sama yaitu Kecamatan Pringgarata.

Menurut hasil survei Republika yang melibatkan 1227 responden, munculnya kelompok aliran keagamaan disebabkan oleh empat faktor dominan. Pertama, kegiatan para ulama yang lebih fokus pada urusan duniawi. Kedua, infiltrasi agenda asing. Ketiga, kondisi kemiskinan dan keterbelakangan umat. Keempat, kurangnya pendidikan agama yang memadai. Faktor-faktor ini bekerja secara bersamaan, menyebabkan masyarakat memahami agama sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Selain itu, dalam survei tersebut, metode dakwah yang kurang menarik menempati peringkat kelima.

Sedangkan menurut hemat peneliti, munculnya aliran keagamaan menyimpang tidak terlepas dari tingkat religiusitas masyarakat. Tingkat religiusitas ini dipengaruhi oleh intelektualitas masyarakat terkait dengan ajaran keagamaan. Tingkat intelektualitas masyarakat berpengaruh terhadap spiritualitasnya.



Peneliti sejauh ini memahami bahwa religiusitas merupakan intensitas pelaksanaan ajaran keagamaan oleh seseorang yang memeluk satu agama. Sedangkan intelektualitas keberagamaan merupakan tingkatan pengetahuan terhadap satu agama. Pulau Lombok secara umum dijuluki dengan Pulau Seribu Masjid. Namun tidak semua muslim di Lombok memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Meskipun dalam hal-hal tertentu Lombok merupakan ikon keislaman yang cukup dikenal.

Tingkat intelektualitas dapat mempengaruhi perilaku beragama seseorang. Begitu juga dengan pemilihan kelompok aliran keagamaan dipengaruhi oleh tingkat intelektualitas seseorang. Banyak kasus-kasus penyebaran kelompok aliran keagamaan yang disebabkan karena tingkat intelektualitas keagamaannya yang tergolong “rendah”. Rendah dalam artian bahwa pengetahuan keagamaannya hanya sekedar rutinitas keagamaan saja. Dari hal tersebut maka tidak sedikit kelompok-kelompok tertentu memanfaatkan ini sebagai peluang untuk melakukan rekrutmen.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan berbasis sosial kehidupan keagamaan masyarakat serta pengaruh antar keduanya (Haryanto et al., 2023). Pendekatan sosiologis dibedakan dari pendekatan studi agama lainnya karena fokus perhatiannya pada interaksi antara agama dan masyarakat



(Rifa'i, 2018). Pra anggapan dasar perspektif sosiologis adalah berfokus pada struktur sosial, konstruksi pengalaman manusia, dan kebudayaan termasuk agama (Hamali, 2018). Penelitian ini dianalisis dengan kerangka teoritik polarisasi sosial dan dinamika sosial. Polarisasi sosial yang digunakan adalah konsep teoritik Karl R. Popper terkait masyarakat terbuka dan musuh-musuhnya. Paradigma konsep teori ini ingin membantu mengurai tipologi masyarakat Lombok Tengah sebagai masyarakat terbuka atau tertutup sehingga dengan indicator teoritis dari konsep teoritik tersebut dapat melihat bagaimana polarisasi kelompok aliran keagamaan menyimpang di Lombok Tengah. Konsep teoritik kedua menggunakan dinamika sosial Karl R. Popper juga terkait bagaimana transisi dari masyarakat tertutup ke masyarakat terbuka dengan berbagai tantangan dan konsekwensinya (Karl.R. Popper, 2008)

## C. Pembahasan

### 1. Situasi Sosial Keagamaan Kabupaten Lombok Tengah

Situasi sosial keagamaan kabupaten masyarakat Kabupaten Lombok Tengah akan digambarkan dengan indeks toleransi. Kondisi indeks toleransi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 sebesar 3,68 dan masuk dalam kategori tinggi berdasarkan pada interval yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai pembentuk indeks, dimensi sikap memiliki nilai indeks terendah sebesar 3,20 dengan kategori cukup dan dimensi



sikap pemerintah memiliki indeks tertinggi sebesar 3,96 dengan kategori tinggi. Nilai tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0.07 lebih tinggi dibanding dengan nilai tahun 2021. (Laporan Akhir Tahun Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah, 2022).

Kondisi indeks toleransi Kabupaten Lombok Tengah diatas diperoleh melalui kegiatan Survey Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan tahun 2022. Sampai saat ini data yang diperoleh dalam penelitian ini hanya laporan tahun 2022. Survei Indeks Toleransi ini meneliti 4 dimensi toleransi :1) persepsi, 2) sikap, 3) kerjasama 4), dan sikap pemerintah. Adapun rincian hasil survei indeks toleransi Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

### **Capaian Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 – 2022**

Uraian Capaian Indeks	Tahun							
	2019		2020		2021		2022	
	Skor	Kategor i	Skor	Kategor i	Skor	Kategor i	Skor	Kategor i
Indeks Dimensi Persepsi	3,80	Tinggi	3,91	Tinggi	3,88	Tinggi	3.95	Tinggi
Indeks Dimensi Sikap	3,27	Cukup	3,24	Cukup	3,10	Cukup	3.20	Cukup
Indeks Dimensi Kerjasama- Hub. Sosial	3,32	Cukup	3,34	Cukup	3,16	Cukup	3.18	Cukup
Indeks Sikap Pemerintah	3,88	Tinggi	4,10	Tinggi	3,93	Tinggi	3.96	Tinggi



INDEKS TOLERANSI	3,56	Tinggi	3,72	Tinggi	3,61	Tinggi	3,68	Tinggi
---------------------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

Kondisi indeks toleransi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 sebesar 3,68 dan masuk dalam kategori tinggi berdasarkan pada interval yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai pembentuk indeks, dimensi sikap memiliki nilai indeks terendah sebesar 3,20 dengan kategori cukup dan dimensi sikap pemerintah memiliki indeks tertinggi sebesar 3,96 dengan kategori tinggi. Nilai tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0.07 lebih tinggi dibanding dengan nilai tahun 2021.

Jika kita menganalisis dari daftar pertanyaan tersebut belum mencerminkan situasi lokal Lombok Tengah sehingga tidak merepresentasikan tingkat toleransi masyarakat. Secara fundamental, sikap dalam menerima perbedaan baik pada aspek keyakinan, budaya, sehingga satu sama lain melakukan relasi sosial keagamaan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari (Al Hasanah & Pujilestari, 2024). Perbedaan pemeluk agama memang memiliki kemiripan yang sangat dekat dengan Lombok Tengah dengan Kota Mataram sehingga toleransi beragama mampu dikelola dengan bijaksana (Haryanto et al., 2023). Jika menelaah struktur sosial yang ada di Lombok Tengah mayoritas pemeluk agama di Lombok Tengah adalah

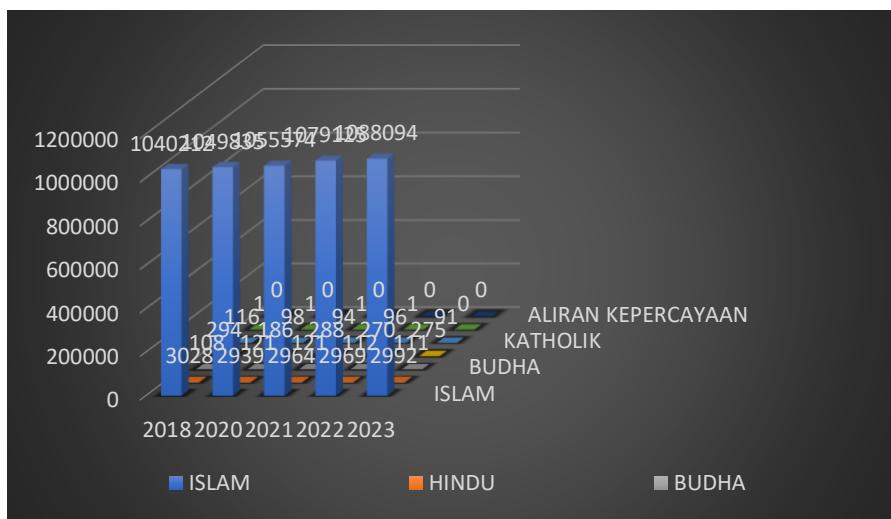


muslim sehingga tingkat toleransi terhadap non muslim sulit diukur. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang cocoknya diajukan kepada masyarakat dengan multi etnis yang lebih kompleks. Pada profil Kabupaten Lombok Tengah juga tidak menampilkan informasi komposisi struktur masyarakat Lombok Tengah seperti jumlah pemeluk agama.

Jika kita melihat trend data komposisi jumlah pemeluk agama di Lombok Tengah, sebagai berikut :

TAHUN	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KHONGHU	KEPERCAYAAN	JUMLAH
2018	1.040.212	294	116	3.028	108	1	-	1.043.759
2020	1.049.835	286	98	2.939	121	1	0	1.053.280
2021	1.055.574	288	94	2.964	121	1	0	1.059.042
2022	1.079.125	270	96	2.969	112	1	0	1.082.573
2023	1.088.094	275	91	2.992	111	1	0	1.091.564





Grafik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Islam mendominasi komposisi struktur penduduk Lombok Tengah. Berdasarkan komposisi ini masyarakat dengan multikultural yang tinggi adalah wilayah Kecamatan Praya dan Kecamatan Jonggat sehingga komposisi respon untuk dua kecamatan ini seharusnya lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan yang mayoritas muslim. Hal ini akan menunjukkan tingkat toleransi berdasarkan pengalaman. Jika kita melihat hasil survei tersebut, indeks persepsi sangat tinggi mencapai 3,95 di tahun 2022 yang artinya bahwa secara konseptual dan normativitas masyarakat Lombok Tengah memahami betul tentang toleransi. Namun pada indeks sikap dan kerjasama cukup rendah dengan indeks 3,20 dan 3,18. Artinya bahwa pada level aksiologi masyarakat Lombok Tengah masih terindeks rendah. Hal ini dipengaruhi oleh komposisi struktur

masyarakat berdasarkan jumlah pemeluk agama. Pada masyarakat muslim yang mayoritas maka aspek pengalaman toleransi pun akan sangat rendah. Momentum persentuhan dengan non-muslim masih sangat rendah jika dibandingkan dengan interaksi dengan sesama muslim.

Jika kita analisis juga dari pertanyaan yang diajukan mengarah pada situasi dimana seorang pemeluk beragama berinteraksi dengan antar personal pemeluk agama. Sedangkan secara komposisi tadi mayoritas muslim. Maka informasi tentang sikap toleransinya lemah.

Melihat dengan kacamata Karl R Popper, masyarakat Lombok Tengah tidak termasuk dalam masyarakat terbuka. Justru termasuk masyarakat tertutup yang sulit untuk dipengaruhi oleh modernisasi, globalisasi maupun industrialisasi. Masyarakat Lombok Tengah masih sangat kental dalam melestarikan dan menjaga tradisi dan budaya. Nilai-nilai kearifan lokal di Lombok, khususnya di Lombok Tengah seperti konsep menyame Braye Saling Ajinin, Krame, dapat digunakan sebagai dasar untuk peraturan kerukunan antar umat beragama (Aditi, 2024). Sebagaimana fungsi SKB 3 Kementerian, yang terdiri dari Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri, tentang kerukunan, dengan tujuan untuk mendukung keberagaman agama di Indonesia dan mencegah konflik yang dapat muncul sebagai hasil dari perbedaan agama (Iqbal, 2021). Jika kembali dengan Karl R. Popper dengan bukunya Masyarakat Terbuka dan



Musuh-Musuhnya (Karl. R. Popper, 2008), masyarakat terbuka digambarkan dengan masyarakat abstrak yang tidak memiliki identitas yang jelas seperti halnya masyarakat tertutup dengan tribalismenya.

“Masyarakat magis atau tribal atau kolektivis juga akan disebut sebagai masyarakat tertututup (closed society), dan masyarakat yang menjadi tempat terjadinya konfrontasi individu-individu dengan keputusan-keputusan personal disebut sebagai masyarakat terbuka (open society)”.

Terlepas dari sebutan masyarakat terbuka maupun tertutup, indikator masyarakat terbuka maupun tertutup pada dasarnya terdapat pada masyarakat Lombok Tengah. Namun bukan berarti masyarakat Lombok Tengah pada fase perubahan menjadi masyarakat terbuka. Masyarakat terbuka merupakan keniscayaan dari modernisasi. Lombok Tengah sudah masuk dalam wilayah yang dipengaruhi oleh modernisasi, globalisasi dan industrialisme. Wujud masyarakat terbuka ialah kepastian akan kebebasan individu-kelompok, bersifat pola pikir yang maju, dan mampu melihat sebab-akibat (Popper et al., 2003). Hal tersebut terlihat dengan bagaimana masyarakat Lombok Tengah mayoritas masih melestarikan budaya-budaya asli Sasak seperti pada acara pernikahan, maulid, dan tradisi-tradisi banjar dan lain sebagainya. Masyarakat Lombok Tengah masih sangat kental



dengan tradisi-tradisi tersebut. Jika di Lombok Utara tradisi atau budaya masyarakat dilembagakan menjadi masyarakat adat, Lombok Tengah tidak perlu melakukan itu karena para kelompok bangsawan sangat berkontribusi terhadap pelestarian tradisi dan budaya asli sasak. Meskipun dalam beberapa praktik sudah menggunakan cara modern namun tetap memegang teguh nilai-nilai dasar bahkan makna tradisi yang melekat dalam praktik pelaksanaan budaya. Konsekuensi dari masyarakat terbuka sangat berpotensi terhadap persoalan terhadap masyarakat seperti cara beragama yang ekstremis, post-truth, dan sifat dan sikap yang enggan dalam mewujudkan inklusivisme dalam perbedaan (Lee, 2015).

Jika boleh mengatakan bahwa masyarakat Lombok Tengah adalah masyarakat tribal yang sudah modern. Artinya sisi tribalisme, fundamentalisme dan eksklusivisme masih sangat terlihat pada masyarakat Lombok Tengah. Lahirnya tribalisme tentu tidak lepas dari gaya hidup, kesamaan pandangan, ideologi, cara berpakaian, dan adanya kesamaan esosional yang sangat erat satu sama lain yang berada pada rumpun masyarakat (Maffesoli & Foulkes, 1988). Begit juga dengan fundamentalisme, umumnya karena dipengaruhi oleh dua kecenderungan utamanya: (1) fundamentalisme yang berpusat pada syari'ah; dan (2) karena adanya anti-kolonialisme dan anti-imperialisme yang kemudian mengarah pada anti-Barat (Bakar Ms, 2018).



Masyarakat Sasak di Lombok Tengah mengalami dilema antara tuntutan modernisasi, globalisasi, dan industrialisasi yang mendorong individu menjadi lebih individualis, dengan tuntutan menjaga kolektivitas dan solidaritas sosial yang merupakan ciri masyarakat tradisional. Kesamaan nilai dan norma sosial tetap penting untuk menjaga kohesi sosial, namun modernisasi juga membawa komoditisasi dan komersialisasi tradisi yang membutuhkan biaya besar, memaksa sebagian masyarakat mengikuti arus perubahan meski berisiko pada struktur sosial dan budaya. Di sisi lain, industrialisasi belum berkembang pesat; UMKM banyak yang tidak mampu bersaing dan penipuan marak, menandakan masyarakat masih dalam proses menuju modernitas. Meski ada pertumbuhan ekonomi seperti menurunnya kemiskinan dan berkembangnya sektor pariwisata, pendidikan, dan pertanian, manfaatnya belum dirasakan merata. Sebagai masyarakat agraris, Lombok Tengah menunjukkan ciri solidaritas organis sebagaimana dibuktikan dalam berbagai penelitian yang menggunakan teori solidaritas sosial Durkheim.

Diantara penelitian tersebut adalah : 1) “Nilai Sosial Dan Keagamaan Dalamtradisi Banjar Merarik Masyarakat Di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah” oleh Muhammad Efendi Tahun 2024. 2) “Kontribusi Tradisi Banjar Merarik Terhadap Solidaritas Masyarakat Di Desa Penujak



Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah oleh Baiq Mutia Arma Asnawi 2023. 3) Solidaritas Sosial Dalam Tradisi Banjar Sekolah Pada Masyarakat Suku Sasak Di Desa Pejanggik Kecamatan Praya Tengah oleh Aprianto Sasri Utari Tahun 20244) Nilai-Nilai Sosial Dan Keagamaan Dalam Adat Nyongkolan Di Desa Tanak Rarang Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah oleh Ahmad Mudzaffar Tahun 2024.

2. Kelompok Aliran keagamaan Menyimpang Yang Muncul Di Lombok Tengah

Ada beberapa aliran keagamaan yang muncul di Lombok Tengah, Aliran Wahdatul Wujud, Islam Sasak, Kelompok Shamsiyah, Kelompok Aliran Sesat di Desa Menemeng dan Kelompok Ahmadiyah. Aliran *Wahdatul Wujud* yang berkembang di beberapa wilayah Lombok Tengah, seperti Praya, Jonggat, dan Batukliang, mengajarkan konsep kesatuan antara Tuhan dan ciptaan, berdasarkan pemikiran Ibnu Arabi. Ajaran ini masih hidup di kalangan masyarakat pedesaan dan pesantren yang mempraktikkan tasawuf. Namun, aliran ini dianggap menyimpang oleh banyak tokoh Islam karena bertentangan dengan prinsip Tauhid, seperti penegasan perbedaan mutlak antara Tuhan dan makhluk. Pandangan mereka terhadap kenabian, wahyu, dan penggunaan simbolisme filosofis dalam mistisisme juga menjadi alasan penolakan dari kalangan Islam mainstream.



Kelompok-kelompok lain yang juga dianggap menyimpang adalah *Islam Sasak* (terutama Wetu Telu) yang mencampurkan ajaran Islam dengan kepercayaan lokal, serta *kelompok Shamsiyah* yang ajarannya menyimpang dari Islam arus utama. Di Desa Menemeng, Pringgarata, muncul kelompok yang dipimpin oleh seorang pemuda yang mengklaim bangun dari mati suri dan menolak semua tafsir ulama, bahkan membakar kitab-kitab tafsir. Aktivitas keagamaannya berpusat pada pembacaan al-Qur'an secara literal tanpa dasar keilmuan yang memadai, hingga akhirnya pemimpin kelompok ini dipenjara.

Kelompok *Ahmadiyah* juga berkembang di Lombok Tengah selain wilayah lain di NTB. Meskipun memiliki struktur organisasi, ajarannya dianggap menyimpang oleh pemerintah dan organisasi Islam karena keyakinan mereka terhadap kenabian setelah Nabi Muhammad SAW. SKB 3 Menteri menyatakan aliran ini sesat, memicu konflik sosial berupa pengusiran dan kekerasan. Pola interaksi eksklusif dari kelompok ini menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Selain itu, terdapat pula individu-individu dengan pemahaman keagamaan yang tidak rasional dan viral di media sosial, seperti yang mengaitkan Prabu Siliwangi dengan reinkarnasi Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan fenomena



penyimpangan keagamaan yang lebih luas di luar kelompok terorganisir.

### 3. Perkembangan Aliran keagamaan Menyimpang di Lombok Tengah

Lombok Tengah, seperti halnya banyak daerah lain di NTB, memiliki latar belakang budaya yang kaya dengan nilai-nilai agama yang kuat, terutama dalam Islam. Namun, interaksi yang intens antara modernisasi dan tradisi lokal kadang memunculkan interpretasi-interpretasi keagamaan baru yang dianggap menyimpang dari ajaran utama. Kementerian agama telah menyatakan bahwa setiap kelompok keagamaan yang keluar dari rukun iman dan Islam maka itu adalah sesat (Kementerian Agama, 2019). Kelompok-kelompok ini biasanya memperkenalkan pemahaman keagamaan yang berbeda, sering kali dengan mengklaim memiliki wahyu atau pencerahan khusus. Interpretasi yang menyimpang dari norma keagamaan umum ini membuat mereka dianggap sebagai ancaman oleh komunitas dan pemerintah.

Banyak aliran keagamaan menyimpang dipimpin oleh tokoh yang memiliki pengaruh kuat dan karisma yang dapat memengaruhi pengikutnya untuk meninggalkan ajaran mainstream dan mengadopsi doktrin baru. Gerakan keagamaan baru termasuk dalam tiga kelompok: Penolakan global Mengakomodasi seluruh dunia Penegasan dunia, tetapi seringkali gerakan semacam ini menekankan pada aspek



penolakan terhadap dunia (Wallis, 2019). Aliran-aliran ini sering kali memiliki sistem keanggotaan tertutup dan hanya terbuka untuk orang-orang tertentu yang dianggap ‘siap’ menerima ajaran mereka. Ini menciptakan komunitas eksklusif yang membatasi kontak luar untuk mempertahankan identitas dan ajaran mereka.

Lombok Tengah, kehadiran aliran menyimpang dapat menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Masyarakat yang tidak sepaham dengan aliran ini mungkin merasa perlu melakukan tindakan penolakan, yang kadang berkembang menjadi konflik terbuka. Aliran menyimpang sering kali diwaspadaai oleh masyarakat lokal, yang khawatir terhadap potensi kekerasan atau tindakan kriminal yang bisa muncul dari ketidaksepakatan terhadap ajaran aliran tersebut. Dalam pandangan lain, kelompok dominan umumnya menggunakan terminologi “menyimpang” untuk melawan kelompok sesat (Marx & Marx, 1977). Beberapa kasus ketegangan antara kelompok ini dan masyarakat utama telah tercatat, meskipun sebagian besar tetap dalam lingkup kecil. Para pengikut aliran menyimpang mungkin merasa diasingkan atau tidak diterima oleh komunitas utama. Di sisi lain, masyarakat setempat merasa terganggu dengan adanya ajaran yang berbeda dan menyimpang dari agama mereka, yang dapat

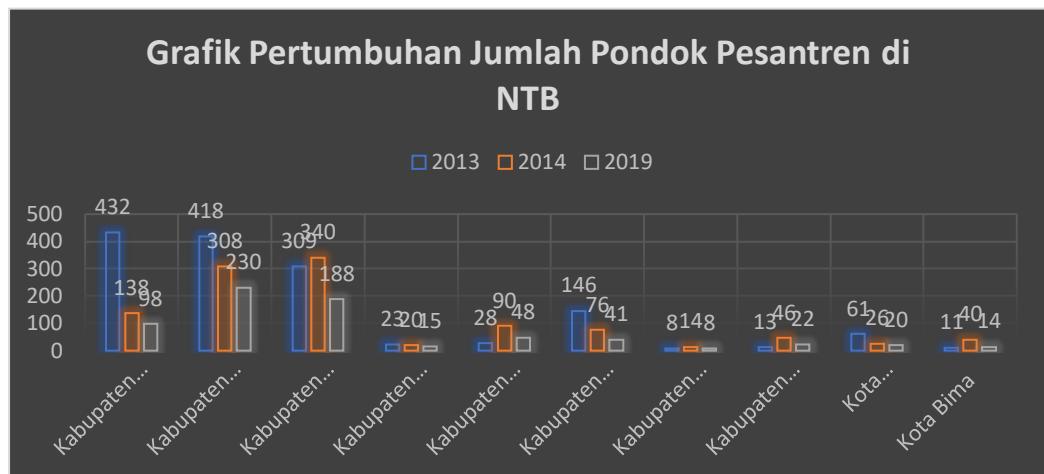


menimbulkan rasa waspada berlebihan terhadap siapa saja yang dianggap bagian dari kelompok tersebut.

Fenomena aliran menyimpang di Lombok Tengah merupakan tantangan yang harus dihadapi secara komprehensif dengan pendekatan agama dan sosial. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat untuk meminimalisasi dampak negatif aliran-aliran ini. Memperkuat pendidikan agama, meningkatkan wawasan keagamaan melalui kajian yang terbuka, dan mendorong diskusi sehat di tingkat komunitas adalah langkah penting untuk mencegah masyarakat tertarik pada ajaran-ajaran yang menyimpang dari keyakinan utama.

Sepanjang 10 tahun terakhir perkembangan aliran keagamaan menyimpang di Lombok Tengah tidak secara signifikan muncul. Aliran keagamaan menyimpang sangat sulit berkembang dikarenakan tipologi masyarakat Lombok Tengah yang lebih cenderung tekstualis sehingga sulit menerima perbedaan-perbedaan yang muncul dalam praktik beragama. Hal ini disebabkan karena jumlah pondok pesantren sebagai lembaga keagamaan di Lombok Tengah tertinggi di NTB. Berdasarkan data statistik Nusa Tenggara Barat, berikut adalah grafik jumlah pondok pesantren berdasarkan





Hal ini menentukan tingkat religiusitas masyarakat yang berdampak terhadap bagaimana merespon kemunculan aliran-aliran keagamaan menyimpang. Dengan tingkat pengetahuan agama ini masyarakat lebih waspada terhadap munculnya kelompok atau munculnya praktik-praktik keagamaan yang menyimpang. Bahkan potensi kemunculan kelompok menyimpang sangat dapat cepat terdeteksi oleh masyarakat sendiri.

Perkembangan aliran keagamaan menyimpang cepat terjadi dikalangan keluarga dan masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan karena tingkat solidaritas masyarakat Lombok Tengah sangat tinggi. Solidaritas sosial ini berdampak sangat signifikan terhadap penerimaan dan fanatisme terhadap kelompok-kelompok tertentu. Hal ini juga dibuktikan dengan perkembangan kelompok keorganisasian masyarakat seperti

NW dan NWDI, NU, Muhammadiyah, Salafi Wahabi juga memiliki pola yang sama.

#### 4. Polarisasi Aliran keagamaan Menyimpang di Lombok Tengah

Bagi sebagian orang, pengetahuan agama yang terbatas dapat menyebabkan kebingungan dan kerentanan terhadap ajaran yang berbeda. Hal ini membuat mereka mudah tertarik pada aliran yang menjanjikan jawaban cepat atas kebingungan spiritual, sementara pihak lain merasa bahwa kelompok ini merusak keutuhan ajaran agama utama. Aliran-aliran baru sering kali menggunakan media sosial atau komunikasi tertutup yang sulit dimonitor, menyebarkan ajaran yang kontroversial dan menciptakan persepsi negatif bagi kelompok lain. Perbedaan pandangan ini sering kali diperparah oleh kurangnya transparansi dalam informasi yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kelompok-kelompok ini. Beberapa individu yang berada dalam tekanan ekonomi atau sosial cenderung mencari jalan keluar dalam bentuk komunitas baru yang dapat memberikan dukungan emosional atau material. Hal ini menciptakan kelompok yang solid, yang sering kali menjadi "berlawanan" dengan masyarakat umum.

Polarisasi ini biasanya membentuk dua kubu besar, yaitu: kelompok yang mendukung kebebasan beragama dan kelompok yang mempertahankan kesucian ajaran agama mainstream (Suryadi & Anwar, n.d.). Kelompok pertama mungkin menganggap keberadaan aliran baru sebagai bentuk kebebasan beragama, sementara kelompok kedua



menganggapnya sebagai ancaman yang harus dibendung. Masyarakat lokal mungkin mengembangkan stigma negatif terhadap anggota aliran keagamaan yang dianggap menyimpang. Stigma ini memperburuk jarak sosial antara pengikut aliran tersebut dan masyarakat umum, sehingga menimbulkan prasangka yang terus menguat. Tokoh agama dan masyarakat biasanya berperan besar dalam menilai dan mempengaruhi persepsi publik terhadap aliran menyimpang. Penilaian keras dari tokoh berpengaruh dapat memperkuat polarisasi, namun bisa juga meredam konflik jika pendekatannya penuh dengan dialog dan inklusi.

Polarisasi menyebabkan masyarakat saling curiga dan kurang toleran dapat memicu ketegangan antara kelompok masyarakat yang berbeda keyakinan. Kelompok agama yang bertentangan ditunjukkan oleh dua kubu tagar di Twitter Indonesia yang pro-khilafah dan pro-pemerintahan (As'adi, 2020). Hal ini menyebabkan penurunan kohesi sosial dan meningkatkan risiko konflik terbuka. Ketika masyarakat terpolarisasi, solidaritas antarwarga melemah, menciptakan suasana yang kurang aman. Beberapa warga mungkin merasa terisolasi atau tidak diterima oleh komunitas utama, sehingga hubungan antarwarga menjadi renggang. Polarisasi juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap keberagaman agama. Di satu sisi, polarisasi dapat memicu intoleransi.



Sedangkan di sisi lain, masyarakat yang lebih terbuka mungkin melihat situasi ini sebagai alasan untuk memperkuat pemahaman dan toleransi.

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi peneliti menemukan bahwa polarisasi aliran keagamaan menyimpang di Lombok Tengah sebagai berikut :1) Aliran keagaman menyimpang di Lombok Tengah muncul dari interpretasi ajaran agama dalam praktik-praktik beragama. 2) Kecil kemungkinan ada pengaruh dari luar. 3) Pengalaman batin seseorang. 4) Perjalanan rohaniah/atau interpretasi batiniah dalam praktik tarekat.

Dari beberapa pola masuk dan berkembangnya tersebut dapat disimpulkan polarisasi aliran keagamaan menyimpang di Lombok Tengah terjadi secara umum merupakan interpretasi dari ajaran keagamaan. Berawal dari tarekat-tarekat yang dipelajari di pondok-pondok pesantren dikembangkan menjadi pemahaman praktik beragama yang kemudian disosialisasikan kepada lingkungan sekitar. Setiap kelompok keagamaan, seperti tarekat dapat mengembangkan pemahaman agama mereka sendiri berdasarkan pengalaman spiritualnya (Ricoeur & Thompson, 1981).

Pola religiusitas di lingkungan pesantren yang megakulturasikan Islam dan budaya lokal dapat menghasilkan pola yang sangat kontekstual dan "menyimpang" dari norma konvensional (Hefner, 2011). Polarisasi atau pemisahan diri dari kelompok menyimpang terhadap masyarakat luas, ada



keterkaitan antara pola kemunculan dengan pola perkembangan sehingga ajaran agama terus berkembang. Pelajar tarekat menafsirkan teks dan menyebarkan penafsiran tersebut secara lokal (Gadamer, 2013). Pola kemunculan atas penolakan tersebut, sehingga biasanya melakukan praktik keagamaan secara diam-diam kemudian melakukan perekrutan secara diam-diam. Setelah mereka banyak mereka kemudian membangun tempat dan melakukan aktivitasnya di satu tempat tertentu. Kalau yang mengalami kekurangan ekonomi biasanya tempat yang digunakan adalah rumah pemimpin mereka namun bisa juga rumah-rumah salah satu anggota mereka.

## 5. Dinamika Sosial Keagamaan dan Aliran keagamaan di Lombok Tengah

Dinamika sosial merujuk pada perubahan yang terjadi secara terus-menerus dalam masyarakat, yang mengakibatkan perubahan dalam pola hidup masyarakat secara keseluruhan. Transformasi sosial, di sisi lain, adalah perubahan yang tidak hanya mempengaruhi individu tetapi juga seluruh komunitas atau masyarakat. Pengaruh dinamika sosial terhadap transformasi sosial dalam masyarakat adalah sesuatu yang lumrah, karena perubahan menandakan adanya perkembangan dan inovasi yang sedang berlangsung.



Kematangan dalam menghadapi perubahan dan dinamika di lingkungan masyarakat dapat diminimalkan dengan keterlibatan dan komitmen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta penanganan konflik atau peristiwa yang terjadi. Sistem sosial masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai yang kuat, norma-norma yang dipegang teguh, memprioritaskan musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan menghargai keragaman budaya diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari perubahan terhadap masyarakat (Arif Ismunandar, 2019).

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat memiliki signifikansi yang penting, karena menandakan bahwa arah perkembangan dan inovasi sedang berlangsung. Perubahan ini melibatkan sistem sosial secara umum, termasuk organisasi sosial yang ada dalam masyarakat. Perubahan bisa terjadi dalam berbagai tingkat, yakni lambat, sedang, atau cepat, tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi situasi di dalamnya (Agus Salim, 2022).

Pada akhir-akhir ini dinamika umat Islam di Indonesia ramai dengan berkembangnya komunitas religius. Para pemuka agama tidak sedikit yang mengambil sikap dengan memberikan label aliran sesat atau komunitas sesat. Aliran keagamaan kelompok sempalan di Indonesia telah ada sejak dulu, karena tipologi masyarakat Indonesia yang majemuk/multikultur dan cenderung akomodatif menyebabkan kelompok aliran-aliran keagamaan sempalan



yang muncul mudah diterima hingga tumbuh besar dan berkembang. Satu yang sangat disayangkan tidak ada satu pun institusi keagamaan yang memiliki data konkret tentang aliran-aliran tersebut, baik menyangkut nama-nama aliran keagamaan, tokoh-tokoh, aspek- aspek ajaran, maupun jumlah pengikutnya. Seringkali, masyarakat lokal menanggapi dengan keras terhadap aliran semplan, terutama jika mereka dianggap menyimpang dari keyakinan Islam utama masyarakat Sasak. Ketegangan menyebabkan tindakan diskriminatif, pengucilan, atau bahkan konflik fisik seperti pengusiran dan pembakaran rumah ibadah (Crouch, 2011).

Penelitian ini menganalisis polarisasi dalam kemunculan kelompok aliran-aliran keagamaan Islam sempalan menggunakan pendekatan sosiologi agama. Hal ini merupakan refleksi dari sudut pandang sosiologis terhadap perkembangan aliran-aliran keagamaan di Lombok Tengah. Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan deskripsi tentang dinamika kehidupan aliran-aliran keagamaan tersebut. Selama ini, perkembangan aliran-aliran keagamaan cenderung dianalisis dari perspektif teologis. Pendekatan agama yang lebih berfokus pada aspek teologis cenderung membedakan antara aliran utama dan aliran sempalan. Pendekatan ini cenderung menitikberatkan pada analisis dan penilaian yang bersifat doktrinal teologis; aliran yang dianggap ortodoks



dianggap sebagai yang benar, sedangkan aliran yang dianggap tidak sejalan dengan kebenaran agama sering kali dicap sebagai sesat. Pendekatan teologis ini dapat menghasilkan sikap penilaian yang keras; menyebut suatu aliran atau ajaran sebagai menyimpang pada dasarnya merupakan klaim kebenaran yang subjektif.

Kondisi teologi seperti ini masih ada dan terus berkembang sampai hari ini. Ini bahkan telah dianggap normal, ortodoks, dan tidak dapat dipertikaikan. Dengan kata lain, taqdis al-fikr terjadi, menurut Arkoun elah terjadi taqdis al-fikr (Mufidah, 2017). Penggunaan istilah "aliran sempalan" untuk menggambarkan komunitas penganut aliran keagamaan tertentu yang dianggap "aneh" atau "Menyimpang" dari mayoritas umat bukanlah tanpa masalah. Salah satu masalah yang timbul sebagai dampak sosial dan implikasi dari penggunaan istilah "sempalan" atau "sektarian" terhadap suatu kelompok keagamaan adalah bahwa istilah tersebut memiliki konotasi negatif. Istilah tersebut sering kali merupakan protes terhadap sikap eksklusif, pendirian yang keras tetapi kaku, klaim monopoli atas kebenaran, dan fanatisme.

Permasalahannya kemudian adalah ketika aliran sempalan disebut sebagai aliran yang menyimpang atau memisahkan diri dari aliran utama yang dipandang sebagai ortodoks atau mainstream, maka pertanyaannya adalah ortodoksi mana yang dijadikan sebagai patokan untuk



menentukan penyimpangannya. Konsep "benar" atau menyimpang bersifat relatif dan perlu didiskusikan serta diperdebatkan. Dalam diskusi atau perdebatan tentang aliran yang benar dan yang sesat, muncul pertanyaan tentang "aliran sesat versi siapa". Ini menyoroti subjektivitas dalam menilai dan menentukan kebenaran agama, serta kompleksitas dalam menafsirkan dan memahami beragam aliran keagamaan. Kehidupan sosial keagamaan di Lombok Tengah dapat dikatakan tidak dinamis karena masyarakat Lombok Tengah sangat tertutup mengenai agama. Masyarakat Lombok Tengah sangat tertutup berbicara tentang agama.

Masyarakat Lombok Tengah tertutup dengan kajian keIslamam namun sangat terbuka dengan pembelajaran keislaman. Seperti antitesis yang dikemukakan oleh Amin Abdullah dalam bukunya *Islamic Studies* di Perguruan Tinggi yang ingin mengeluarkan dari pergumulan "normativitas" dan "historisitas" dengan "interkoneksi" (Ahmad Syafi'i SJ, dkk, 2019). Paradigma "interkoneksi" ini berasumsi bahwa untuk memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapkan dijalani manusia, setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama (termasuk agama Islam dan agama-agama yang lain), keilmuan sosial, humaniora, maupun ke-alaman tidak dapat berdiri sendiri. Begitu ilmu pengetahuan tertentu mengklaim dapat berdiri



sendiri, merasa dapat menyelesaikan persoalan secara sendiri, tidak memerlukan bantuan dan sumbangan dari ilmu yang lain, maka self sufficiency ini cepat atau lambat akan berubah menjadi narrow mindedness untuk tidak menyebutnya fanatisme partikularitas disiplin keilmuan. Kerjasama, saling tegur sapa, saling membutuhkan, saling koreksi dan saling keterhubungan antar disiplin keilmuan akan lebih dapat membantu manusia memahami kompleksitas kehidupan yang dijalani-nya dan memecahkan persoalan yang dihadapinya.

Secara epistemologis, paradigma interkoneksi merupakan jawaban atau respon terhadap kesulitan-kesulitan yang dirasakan selama ini yang diwariskan dan diteruskan selama berabad-abad dalam peradaban Islam tentang adanya dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama. Masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tanpa merasa perlu saling bertegur sapa. Kesulitan epistemologis ini rupanya berdampak secara struktural-politis dengan berdirinya Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama di awal kemerdekaan Republik ini (Sutarto, 2017). Terpisahnya dua departemen ini, khususnya dalam hal pendidikan menambah sempurnanya dikotomi dimaksud. Dari waktu ke waktu, upaya untuk mendekatkan kembali jurang pemisah atau gap antara keduanya, khususnya dalam wilayah pendidikan semakin tampak nyata.

Paradigma interkoneksi, secara aksiologis, hendak menawarkan pandangan dunia (world view)



manusia beragama dan ilmuwan yang baru, yang lebih terbuka, mampu membuka dialog dan kerjasama, transparan, dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan berpandangan ke depan. Secara antologis, hubungan antar berbagai disiplin keilmuan menjadi semakin terbuka dan cair, meskipun blok-blok dan batas-batas wilayah antara budaya pendukung keilmuan agama bersumber pada teks-teks (hadlarah al-nash), dan budaya pendukung keilmuan factual-historis-empiris yakni ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kealaman (hadlarah al ilm) serta budaya pendukung keilmuan etis-filosofis (hadlarah al-Falsafah) masih tetap saja ada (Waston, 2016). Hanya saja cara berfikir dan sikap ilmuwan yang membidangi dan menekuni ilmu-ilmu ini yang perlu berubah.

Hal ini dialami oleh masyarakat Lombok Tengah yang sangat konsen dalam pembelajaran normative keislaman dan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut, yaitu:

#### 6. Resistensi dari Otoritas Keagamaan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berbagai otoritas keagamaan lainnya sering kali mengcam aliran-aliran yang dianggap menyimpang karena mereka memandang aliran-aliran tersebut sebagai ancaman terhadap kesatuan dan kemurnian ajaran Islam. Wahdatul Wujud dianggap menyimpang oleh otoritas ini karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang sudah mapan.



Alasan-alasan ini membuat Wahdatul Wujud sering kali dikritik dan dianggap sebagai aliran yang menyimpang dari ajaran Islam mainstream. Penting untuk memahami bahwa penilaian ini dapat bervariasi tergantung pada perspektif keagamaan dan interpretasi masing-masing kelompok.

Hukuman resmi terhadap aliran agama yang dianggap menyimpang, termasuk Wahdatul Wujud, dapat bervariasi tergantung pada negara dan yurisdiksi hukum setempat. Di Indonesia, penanganan aliran agama yang dianggap menyimpang biasanya melibatkan beberapa langkah yang dapat mencakup:

a. Penegakan Hukum oleh Pemerintah

Pemerintah, melalui berbagai lembaga seperti Kementerian Agama dan aparat kepolisian, dapat melakukan tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika suatu aliran dianggap menyimpang atau membahayakan ketertiban umum, maka pemerintah dapat melakukukan beberapa tindakan, yaitu: Pertama, Melakukan Peneguran atau Pembubaran. Pemerintah juga dapat mengeluarkan peringatan atau keputusan pembubaran terhadap kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang jika mereka dianggap melanggar hukum atau norma sosial. Kedua, Menghentikan Aktivitas: Aktivitas-aktivitas kelompok yang dianggap menyimpang dapat dihentikan jika terbukti melanggar peraturan perundang-



undangan atau memicu konflik sosial (Khasanah & Pratama, 2023).

b. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI, sebagai lembaga yang berwenang dalam hal fatwa dan penilaian terhadap aliran-aliran agama, dapat melakukan beberapa tindakan, yaitu: Pertama, Mengeluarkan Fatwa. MUI bisa mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa aliran tertentu, seperti Wahdatul Wujud, dianggap menyimpang dari ajaran Islam mainstream. Meskipun fatwa ini bersifat rekomendasi, pengikut fatwa ini dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan tindakan masyarakat. Kedua, Menyarankan Pembinaan. MUI juga dapat merekomendasikan pembinaan atau dialog antara pengikut aliran tersebut dengan otoritas agama untuk kembali ke ajaran yang dianggap benar oleh mayoritas (Makmur, 2019).

c. Hukuman Sosial dan Masyarakat

Selain tindakan resmi dari pemerintah atau lembaga keagamaan, aliran-aliran yang dianggap menyimpang sering kali mengalami: Stigmatisasi dan Penolakan Sosial: Pengikut aliran-aliran ini mungkin mengalami penolakan dari masyarakat atau stigma sosial. Ini bisa mencakup isolasi sosial atau pembatasan dalam berinteraksi dengan komunitas mainstream. Perdebatan dan Kontroversi:



Aliran-aliran yang dianggap menyimpang sering kali terlibat dalam perdebatan publik dan kontroversi yang dapat mempengaruhi reputasi mereka di masyarakat.

d. Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang penyimpangan ajaran agama dan keagamaan, seperti: UU Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama (Sumbulah, 2014). Undang-undang ini melarang penyebaran ajaran yang dianggap menodai atau menyimpang dari ajaran agama yang diakui di Indonesia. Beberapa daerah mungkin memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang ajaran agama dan kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang. Penting untuk dicatat bahwa tindakan resmi dan hukuman terhadap aliran-aliran yang dianggap menyimpang harus memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan, termasuk hak untuk beragama dan berkeyakinan. Pendekatan yang hati-hati dan dialogonstruktif sering kali lebih efektif dalam menangani perbedaan keagamaan dan mencegah konflik sosial. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering kali berhubungan dengan penilaian terhadap aliran-aliran yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam mainstream.

## D. Penutup



Polarisasi kemunculan aliran keagamaan menyimpang di Lombok Tengah terjadi dengan pengembangan ilmu-ilmu tarekat. Perkembangannya melalui interaksi antar individu dengan kuatnya solidaritas sosial di Lombok Tengah yang menjadi faktor utama mendukung perkembangan aliran keagamaan menyimpang. Karena dari beberapa aliran keagamaan yang muncul keanggotaannya lebih banyak masyarakat sekitar terutama keluarga.

Sedangkan dinamika sosial keagamaan di Lombok Tengah tidak terlalu kompleks mengingat intensitas konflik sosial keagamaan sangat rendah. Meskipun Lombok Tengah sering muncul dalam pemberitaan karena konflik sosial separatis. Konflik sosial yang banyak muncul adalah konflik sosial separatis yang dikarenakan kesalahpahaman antar warga, kriminalitas, dan pemicu lainnya seperti ekonomi maupun politik. Sedangkan konflik sosial keagamaan intensitasnya rendah dikarenakan cepat tanggapnya perangkat seperti PAKEM dalam merespon kemunculan kelompok-kelompok aliran keagamaan menyimpang. Selain itu, pengawasan terhadap kemunculan aliran keagamaan menyimpang tidak hanya dilakukan oleh perangkat pemerintahan, melainkan karena sensitivitas masyarakat juga cukup tinggi yang disebabkan oleh solidaritas sosial yang kuat.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Amin, (2012). Islamic Studie di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Popper, Karl R, (2008). Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lubis, Dahlia. (2019). Aliran keagamaan/Kebatinan. Medan, Perdana Publishing.

McCarty, Nolan. Polarization: What everyone needs to know®. Oxford University Press, 2019.

Michaell S. Northcott. 2009. Aneka Pendekatan Studi Agama. Ed. Peter Cannoly). Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.

Acim, S. A., & Rahman, R. (2023). Toleransi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Keislaman*, 6(1), 78–89. <https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3603>

Aditi, I. G. A. (2024). Model Regulasi Kerukunan antar Umat Beragama Bersumber pada Kearifan Lokal Masyarakat Lombok. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 7(1), 61–71. <https://doi.org/10.53977/wk.v7i1.1805>

Ahmad Syafi'i SJ, dkk. (2019). STUDI HUKUM ISLAM INTERDISIPLINER Madzhab "Sunan Giri." CV. NATA KARYA.

Al Hasanah, S., & Pujilestari, Y. (2024). Implementasi sikap toleransi antar umat beragama di kalangan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 23(2), 395–399. <https://doi.org/10.21009/jimd.v23i2.38846>

As'adi, M. H. (2020). Pengaruh Polarisasi Ideologi Agama Islam Terhadap Persebaran Informasi, Disinformasi, dan Hoax di Twitter Indonesia periode November 2019. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33489.35687>

Bakar Ms, A. (2018). FUNDAMENTALISME AGAMA-AGAMA; Sebuah Perspektif Historis. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), 18. <https://doi.org/10.24014/trs.v10i1.5718>

Bruinessen, M. van. (1995). Kitab kuning, pesantren, dan tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia (Cet. 1). Mizan.

Budiwanti, E., & Budiwanti, E. (2000). Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima (Cet. 1). Diterbitkan oleh LKiS Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford



Foundation.

Chittick, W. C. (1989). *The Sufi path of knowledge: Ibn al-’Arabi’s metaphysics of imagination*. State university of New York press.

Crouch, M. A. (2011). Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law. *Asian Journal of Comparative Law*, 7, 1–46. <https://doi.org/10.1017/S2194607800000582>

Debra A. Dalonges and Jacquelyn L. Fried. (n.d.). Hinduism in Modern Indonesia. *Journal of Dental Hygiene*, 90(04). <https://jdh.adha.org/content/90/4/221.short>

Ermagusti, E., Syafrial, S., & Tri Hadi, R. (2022). INTEGRASI TEOLOGI ISLAM, SUFISME, DAN RASIONALISME HARUN NASUTION. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 21(1), 180–208. <https://doi.org/10.30631/tjd.v21i1.237>

Ernst, C. W. (1997). *The Shambhala guide to sufism*. Shambhala.

Gadamer, H.-G. (2013). *Truth and Method*. Bloomsbury Publishing Plc.

Faizah dan Muhammad Thohri. *Strategi Penanganan Paham Keagamaan Menyimpang Dalam Perspektif Dakwah (Studi Pada Kasus-Kasus Yang Ditangani MUI NTB)*. *Jurnal Penelitian Keislaman* 14.1 (2018): 14–30.

Fanani, Ahmad Fuad. "Fenomena radikalisme di kalangan kaum muda." *Jurnal Maarif* 8.1 (2013): 4–13.

Fiorina, Morris P., Samuel A. Abrams, and Jeremy C. Pope. "Polarization in the American public: Misconceptions and misreadings." *The Journal of Politics* 70.2 (2008): 556–560.

Halverson, J. R. (2010). *Theology and creed in Sunni Islam: The Muslim Brotherhood, Ash’arism, and political Sunnism*. Palgrave Macmillan.

Hamali, S. (2018). Agama dalam Perspektif Sosiologis. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 12(2), 86–105. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v12i2.2111>

Haryanto, B., Trisakti, B., Lubis, M., Tarigan, M. B., Ketaren, F. Y., & Alexander, V. (2023). THE UTILIZATION OF PIMPING GRASS (THEMEDA GIGANTEA) AS ADSORBENT OF BABURA RIVER WATER TURBIDITY WITH BATCH OPERATION. *Water*



Conservation & Management, 8(1), 54–65.  
<https://doi.org/10.26480/wcm.01.2024.54.65>

Hefner, R. W. (Ed.). (2011). *Shari'a politics: Islamic law and society in the modern world*. Indiana University Press.

Inkeles, A., & Smith, D. H. (2013). *Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries*. Harvard University Press.  
<https://doi.org/10.4159/harvard.9780674499348>

Ismunandar, Arif. *Dinamika Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Transformasi Sosial Masyarakat*. Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan 3.2 (2020): 205–219.

Iqbal, Muh. (2021). *WAJAH BARU PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA: Jilbab, Toleransi, dan SKB 3 Menteri*. QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama, 13(2), 201–218.  
<https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i2.864>

Jati, Wasisto Raharjo. *Polarization of Indonesian Society during 2014–2020: Causes and Its Impacts toward Democracy*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 26.2 (2022): 152–167.

Kementerian Agama. (2019). *Moderasi beragama* (Cetakan pertama). Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.

Khasanah, R., & Pratama, A. B. (2023). *Kewenangan Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*. Manabia: Journal of Constitutional Law, 3(01), 107–126.  
<https://doi.org/10.28918/manabia.v3i01.962>

Langaji, Abbas. *Dinamika Aliran keagamaan Sempalan: Tinjauan Persepektif Sosiologi Agama*. Hikmah: Journal of Islamic Studies 12.1 (2016): 141–162.

Lee, H. G. (2015). *The Open Society and Its New Enemies*. Diogenes, 62(2), 26–31. <https://doi.org/10.1177/0392192117703044>

Levinson, S. C. (1987). *Pragmatics and the grammar of anaphora: A partial pragmatic reduction of Binding and Control phenomena*. Journal of Linguistics, 23(2), 379–434.  
<https://doi.org/10.1017/S002226700011324>

Longhofer, W., & Winchester, D. (Eds.). (2023). *Social theory re-wired: New connections to classical and contemporary perspectives* (Third edition). Routledge, Taylor & Francis Group.

Maffesoli, M., & Foulkes, C. R. (1988). *Jeux De Masques: Postmodern Tribalism*. Design Issues, 4(1/2), 141.  
<https://doi.org/10.2307/1511397>

Makmur, J. (2019). PERAN FATWA MUI DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA. Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 5(2), 41. <https://doi.org/10.21580/wa.v5i2.3226>

Marx, K., & Marx, K. (1977). Critique of Hegel's "Philosophy of Right" (J. J. O'Malley, Ed.). Univ. Pr.

Mufidah, L. L. N. (2017). PENDEKATAN TEOLOGIS DALAM KAJIAN ISLAM. MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah, 2(1), 151. <https://doi.org/10.33511/misykat.v2n1.151>

Masud, Abdurrahman. Menyikapi keberadaan aliran sempalan. Dialog 32.2 (2009): 16–24.

Nashrullah, Jauhar. Polarisasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum. Realism: Law Review 1.2 (2023): 20–38.

Popper, K. R., Popper, K. R., Popper, K. R., & Popper, K. R. (2003). Der Zauber Platons (H. Kiesewetter, Ed.; 8. Aufl., durchges. und erg.). Mohr Siebeck.

Rahmān, F. (2002). Islam & modernity: Transformation of an intellectual tradition (8. impr.). Univ. of Chicago Press.

Ratnasari, D. (2016). SEJARAH NABI-NABI DALAM AL-QURĀ'IMAN. KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 5(1), 93–106. <https://doi.org/10.24090/komunika.v5i1.773>

Ricoeur, P., & Thompson, J. B. (1981). Hermeneutics and the human sciences: Essays on language, action and interpretation. Cambridge university press Éditions de la Maison des sciences de l'homme.

Rifa'i, Moh. (2018). KAJIAN MASYARAKAT BERAGAMA PERSPEKTIF PENDEKATAN SOSIOLOGIS. AL-TANZIM : JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM, 2(1), 23–35. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i1.246>

Saparudin, S. (2018). GERAKAN KEAGAMAAN DAN PETA AFILIASI IDEOLOGIS PENDIDIKAN ISLAM DI LOMBOK. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 42(1), 220. <https://doi.org/10.30821/miqot.v42i1.506>

Sitorus, N. J. (2023). Ajaran Tarekat Syekh Siti Jenar.

Sumbulah, U. (2014). ALIRAN SESAT DAN GERAKAN BARU



KEAGAMAAN (Perspektif UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dan Hak Asasi Manusia). De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 6(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3209>

Suryadi, I., & Anwar, S. (n.d.). Realitas Virtual dan Polarisasi Agama: Menelaah Pengaruh Media Sosial di Indonesia.

Sutarto, D. (2017). Epistemologi Keilmuan Integratif-Interkoneksi M. Amin Abdullah dan Resolusi Konflik. JURNAL TRIAS POLITIKA, 1(2). <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i2.1064>

Umam, F. (2016). MEMAKNAI KERAGAMAN: The Others dalam Konstruksi Sosial Para Elit Kelompok-kelompok Keagamaan di Kota Mataram. Jurnal Theologia, 27(2), 365–388. <https://doi.org/10.21580/teo.2016.27.2.931>

Wahab, A. J. (2014). Manajemen konflik keagamaan: Analisis latar belakang konflik keagamaan aktual. PT Elex Media Komputindo.

Wallis, R. (2019). The Elementary Forms of the New Religious Life (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429399206>

Waston, W. (2016). PEMIKIRAN EPISTEMOLOGI AMIN ABDULLAH DAN RELEVANSINYA BAGI PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA. Profetika: Jurnal Studi Islam, 17(01), 80–89. <https://doi.org/10.23917/profetika.v17i01.2102>

Zulkarnain, I. (2005). Gerakan Ahmadiyah di Indonesia (Cetakan 1). LKiS Yogyakarta.

